PONTIANAK POST

Sept Okt Mar Apr Mei Agust Jan

Hal.: 17



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tahun 2019 Nihil Pengungkapan Korupsi

Kejari Terima 6 SPDP Kasus Dana Desa

Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2019 ini terbilang nihil. Tak ada satu kasus pun yang berhasil diungkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah. Namun, sudah ada 6 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

MEMPAWAH - "Sepanjang tahun 2019, kami menangani beberapa kasus pidana korupsi. Ada 7 penuntutan yang saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak," kata Kajari Mempawah, Antoni Setiawan SH MH kepada wartawan, Senin (9/12) dalam momentum peringatan hari anti korupsi 2019. Kemudian, lanjut Kajari, ada satu kasus penyidikan umum untuk menentukan tersangka. Kasus tersebut berada dilingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

♦ Ke Halaman 19 Kolom 1



PRESS RELEASE: Kajari saat menggelar konferensi pers terkait kasus korupsi.

PONTIANAK POST

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 2019 Hal.:19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kejari Terima 6 SPDP Kasus Dana Desa

Sambungan dari halaman 17

Maka, pihaknya masih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat Pemkab Kubu Raya.

"Kita sudah minta ban-

tuan Inspektorat Kubu Raya untuk melakukan perhitungan kerugian negara terhadap calon tersangka. Kasusnya berada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar," pa-

parnya

Selanjutnya, Kajari mengatakan, ada 3 tersangka yang dalam proses penuntutan berkaitan dengan kasus dana PNPM. Yakni, Syarifudin, Maya dan M Yunus. Dengan total kerugian negara dalam kasus PNPM itu lebih dari Rp 1 miliar. "Tersangka Maya kerugian negara sebesar Rp 500 juta, Syarifuddin Rp 374 juta dan M Yunus Rp 300 juta lebih,"

sebutnya.

Terkait, Kajari mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima 6 SPDP dari Polres Mempawah dan Polresta Pontianak. Yakni berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. "Lokasinya saya kurang hafal. Yang pasti ada di Kubu Raya dan Mempawah. Dimungkinkan pada akhir tahun ini, atau awal tahun 2020 nanti berkasnya sudah masuk ke meja kerja Kejari Mempawah," tegasnya.

Ditanya modus peny-

impangan, Kajari mengatakan bentuknya pekerjaan fiktif, volume pekerjaan kurang dari perencanaan dan lainnya. Sehingga, penyimpangan ini menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam proses dana desa dan alokasi dana desa. "Yang paling banyak itu pekerjaan fiktif. Misalnya, dalam laporan dikatakan ada pekerjaan namun faktanya dilapangan tidak ada pekerjaan tersebut," paparnya.

Terkait dana desa, Kajari mengaku pihaknya telah memiliki program jaga desa. Namun, program tersebut belum masuk pada proses pendampingan secara aktif. Pihaknya masih tahapan pendekatan dan penyuluhan kepada pemerintah desa.

"Kejaksaan sudah meluncurkan program jaga desa, namun kita belum tahu untuk tahun 2020 nanti seperti apa kelanjutannya. Akan tetapi, sesuai tupoksinya kami siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi, pendampingan dan lainnya," tukas Kajari. (wah)